

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, I. Y., Farida, N., & Saryadi. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Dipenogoro Journal of Social and Politic*, 100-120.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Direktur Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER – 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Indonesia.
- Jazuli, M. (2021). Tinjauan Atas Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Bendahara Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Maos Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Tangerang Selatan, Indonesia: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Kementerian Keuangan. (2008). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan. Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN atau APBD. Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2014). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2019). PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Indonesia.

Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari APBN. Indonesia.

Mandak, A., & Morasa, J. (2015). Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 22-33.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Pemerintah Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Indonesia.

Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Indonesia.

Pemerintah Kota Pekanbaru. (n.d.). *Daftar Profil OPD Pemerintah Kota Pekanbaru*. Retrieved from Web site Kota Pekanbaru: <https://www.pekanbaru.go.id/#footer>

- Pemerintah Provinsi Riau. (2021, Agustus 23). *Riau Provincial Government Organizations*. Retrieved from Web site Provinsi Riau: <https://www.riau.go.id/home/en/content/8/organisasi-pemprov>
- Permata, L. (2020). Tinjauan Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 21 Oleh Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan Provinsi Sumatera Selatan. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Ratnafuri, K., & Herawati, N. (2012). Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 471-492.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity, Tax Compliance: tax Payers' View. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 109.
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2017). *Kupas Tuntas PPh PotPut*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.